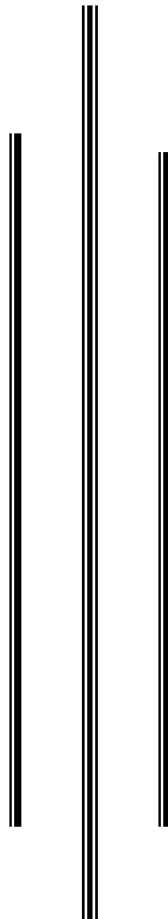




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 merupakan hasil laporan, yang memuat capaian dari target indikator kinerja yang telah diprogramkan sebelumnya untuk dicapai dalam Tahun Anggaran 2020.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ini digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi pada akhir Tahun 2020.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan capaian kinerja Unit Kerja Eselon III Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 pada masa mendatang.

Jambi, 20 Januari 2021

KEPALA BALAI



NIP. 19711007 199803 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai wujud dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2020, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja Eselon III yang bertujuan untuk meningkatkan tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Lima Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang sebanyak 26 Indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2020 di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi telah melaksanakan keseluruhan 26 Indikator Kinerja Utama, dimana 26 Indikator Kinerja Kegiatan (100 %) memiliki persentase pencapaian tingkat capaian sama dengan 100%.

Berdasarkan hasil dari Realisasi Volume Kegiatan yaitu sebesar 99,9%, dapat dicatat bahwa kebijakan, program, sasaran, Indikator Kinerja Utama dan kegiatan yang dilaksanakan belum tercapai 100%, disebabkan oleh berbagai hal yang ada sebagai akibat dari dinamika organisasi yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	
II. PERENCANAAN DAN PERJANIAN KINERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI	II-1
2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020	II-4
2.3. Program Prioritas	II-7
2.4. Kegiatan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020	II-8
III. AKUNTABILITAS KINERJA BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN JAMBI TAHUN 2015	III-1
3.1. Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020	III-1
3.2. Analisis Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	III-4
3.3. Hambatan dan Kendala	III-9
3.4. Usulan Perbaikan	III-9
IV. PENUTUP.....	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menerapkan sistem pemerintahan yang *good governance*, maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraanya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah yang dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah tersebut kepada masyarakat dan rakyat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan merupakan bagian dari instansi pemerintah wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan Jambi Tahun 2016.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPTD Tipe B menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional, pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas Melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, Pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan /atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan tarif angkutan jalan.

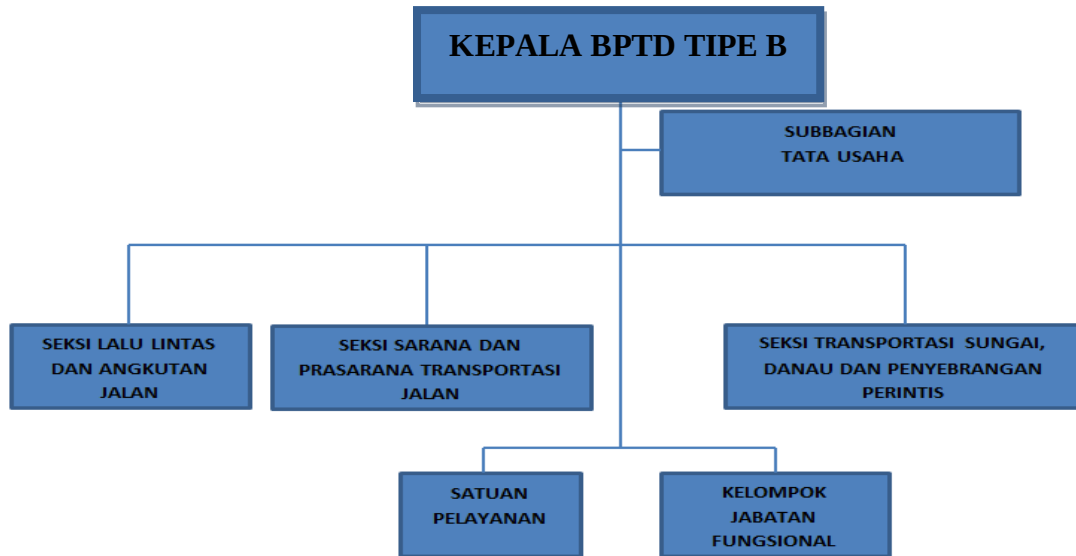
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

Mempunyai tugas Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

5. Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Kerangka Kelembagaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPTD Tipe B

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI

2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 terdiri atas Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V
Provinsi Jambi Tahun 2020**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya Konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	8
		Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	2. Jumlah Paket Pembangunan Rambu Sungai	Unit	75
			3. Jumlah Paket Pembangunan Halte sungai	Paket	8
			4. Jumlah pembangunan pelabuhan sungai	Paket	1
			5. Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1

			6. Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	Laporan	1
2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	7. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
			a. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	538
			b. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell	Unit	125
			c. Jumlah Warning Light Tiang Lurus Solar Cell	Unit	2
			d. Jumlah Guardrail Type II, Terminal End Lengkung	Meter	100
			e. Jumlah Delineator	Unit	300
			f. Jumlah Cermin Tikungan	Unit	-
			g. Jumlah Marka Jalan	M ¹	86000
			h. Jumlah Paku Jalan	Unit	1700
		Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	8. Jumlah paket Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	Paket	1
			9. Jumlah Paket Pembangunan Zoss	Paket	1
			10. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Laporan	1
			11. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan darat	Laporan	1
			12. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji	Laporan	1
			13. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan	Laporan	1

		Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat	14. Jumlah Paket ATCS (Lanjutan)	Paket	1
		Terwujudnya Prasarana Transportasi yang berkeselamatan	15. Jumlah lokasi Rehabilitasi UPPKB	Paket	-
			16. Jumlah lokasi Rehabilitasi Terminal Tipe A	Paket	-
3.	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi criteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	17. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab/Kota	7
			18. Prosentase Sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	100
			19. Prosentase pemenuhan standard operasional pelabuhan penyeberangan perintis	%	100
			20. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas perintis yang memenuhi SPM	%	100
4.	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Tersusunnya Kebijakan Keselamatan Transportasi Darat	21. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan	Bulan	12
5.	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	22. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	orang	100
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	23. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	90
			24. Tingkat penyerapan anggaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	%	90
			25. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	bulan	12

			26. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	bulan	12
--	--	--	--	-------	----

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan kontrak kinerja antara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2020. Total Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Indikator Kinerja dalam mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 89.049.535.000,-**.

Perjanjian Kinerja juga merupakan suatu dasar untuk penilaian pelaksanaan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi. Perjanjian Kinerja terdiri atas beberapa sasaran yang di dalamnya terdapat indikator kinerja kegiatan yang digunakan sebagai acuan penilaian pelaksanaan kegiatan seperti pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V
Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya Konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	8
		Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	2. Jumlah Paket Pembangunan Rambu Sungai	Paket	3
			3. Jumlah Paket Pembangunan Halte sungai	Paket	8
			4. Jumlah pembangunan pelabuhan sungai	Paket	1
			5. Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
			6. Monitoring dan	Laporan	1

			Pengawasan Transportasi SDP		
2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	7. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
			i. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	538
			j. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell	Unit	125
			k. Jumlah Warning Light Tiang Lurus Solar Cell	Unit	2
			l. Jumlah Guardrail Type II, Terminal End Lengkung	Meter	100
			m. Jumlah Delineator	Unit	300
			n. Jumlah Cermin Tikungan	Unit	-
			o. Jumlah Marka Jalan	M ¹	86000
			p. Jumlah Paku Jalan	Unit	1700
		Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	8. Jumlah paket Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	Paket	1
			9. Jumlah Paket Pembangunan Zoss	Paket	1
			10. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Laporan	1
			11. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan darat	Laporan	1
			12. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji	Laporan	1
			13. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan	Laporan	1

		Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat	14. Jumlah Paket ATCS (Lanjutan)	Paket	1
		Terwujudnya Prasarana Transportasi yang berkeselamatan	15. Jumlah lokasi Rehabilitasi UPPKB	Paket	-
			16. Jumlah lokasi Rehabilitasi Terminal Tipe A	Paket	-
3.	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi criteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	17. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab/Kota	7
			18. Prosentase Sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	100
			19. Prosentase pemenuhan standard operasional pelabuhan penyeberangan perintis	%	100
			20. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas perintis yang memenuhi SPM	%	100
4.	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Tersusunnya Kebijakan Keselamatan Transportasi Darat	21. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan	Bulan	12
5.	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	22. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	orang	100
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	23. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	90
			24. Tingkat penyerapan anggaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	%	90

	Perhubungan Darat		25. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	bulan	12
			26. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	bulan	12

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 12.691.000.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 6.222.358.000
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 11.603.632.000
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 2.500.000.000
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Rp. 28.408.137.000
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 27.524.408.000

2.3. PROGRAM PRIORITAS

Untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu disusun program kerja, melalui program kerja akan terlihat tahapan-tahapan yang dilakukan serta dukungan materi atau bahan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan program kerja/kegiatan ini ada beberapa persyaratan / kriteria yang perlu dipenuhi. Beberapa kriteria tersebut antara lain :

1. Dapat dilaksanakan secara baik;
2. Memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
3. Beban anggaran yang murah dan rasionil;
4. Mendukung pemulihan perekonomian;
5. Penyelenggaraan yang transparan;
6. Meneduhkan masyarakat;
7. Mengurangi ketidakpastian yang dihadapi masyarakat;
8. Pelaksanaannya dalam jangka pendek.

Pelaksanaan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi pada tahun 2020 tetap mengacu pada program kerja tahun 2019 yang belum terlaksana dan yang dalam proses penyelesaian dengan beberapa penyempurnaan terhadap program-program yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat terhadap program pembangunan di daerah, dalam kaitan dengan peningkatan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat.

2.4. KEGIATAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Balai Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kegiatan-kegiatan Subbagian Tata Usaha yang akan dilaksanakan sampai dengan Desember 2020 sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2021;
- b. Penyusunan LAKIP, LAPTAH BPTD Wilayah V Provinsi Jambi;
- c. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit;
- d. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi;
- e. Rapat Teknis dan Konsolidasi BPTD Wilayah V Provinsi Jambi;
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
- g. Pengadaan Notebook, printer dan komputer dekstop;
- h. Penyelenggaraan tugas yang merupakan tugas-tugas rutin Subbag Tata Usaha dan sebagai antisipasi tugas ke depan.

2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pada Tahun 2020, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan dan Pemasangan ATCS Kota Jambi (termasuk supervisi);
- b. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Perkotaan Kota Jambi (termasuk supervisi);
- c. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Perkotaan Kota Sungai Penuh – Sei. Penuh – Sanggaran Agung (termasuk supervisi);
- d. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 023 Muara Tembesi – Bts Kota Muara Bulian (termasuk supervisi);
- e. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 027 Bts. Kota Jambi – Talang Duku (termasuk supervisi);
- f. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 034 Bangko – Sei. Manau (termasuk supervisi);
- g. Pembangunan ZOSS di Jambi (termasuk supervisi);
- h. Subsidi Operasional Angkutan Jalan;
- i. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Jambi (*Warning Light*);
- j. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Jambi (*Warning Light*);
- k. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Jambi (Lampu Penerangan Jalan Umum);
- l. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas Perkotaan Muara Bulian dan Bangko (termasuk supervisi);
- m. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Perkotaan Kuala Tungkal;
- n. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 033 Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru – Candi Muaro Jambi;
- o. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas Perkotaan Jambi;
- p. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 004 Sp. Tuan – Bts. Kota Jambi;
- q. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 028 Sp. Tuan – Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim (termasuk supervisi);
- r. Monitoring dan pengawasan angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Darat

Pada Tahun 2020, seksi sarana dan prasarana transportasi darat telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun;
- b. Pendataan Produksi pada Terminal Penumpang Tipe A;

- c. Pendataan LHR Kendaraan Angkutan Barang pada Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin di Terminal dan UPPKB;
- e. Monitoring dan pengawasan industri karoseri di wilayah kerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi;
- f. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor.

4. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Perintis

Pada Tahun 2020, seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Perintis telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Parit Jawa Timur Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur (termasuk supervisi);
- b. Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Beras Dusun Beringin Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur (termasuk supervisi);
- c. Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Rambut Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur (termasuk supervisi);
- d. Pembangunan Halte Sungai Desa Kuala Lagan Kab. Tanjung Jabung Timur (termasuk supervisi);
- e. Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Parit Sidang Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Timur (termasuk supervisi);
- f. Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Raya Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Timur (termasuk supervisi);
- g. Pembangunan Halte Sungai Kelurahan Betara Kiri Kec. Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Timur (termasuk supervisi);
- h. Pembangunan Halte Sungai Desa Manis Mato Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi (termasuk supervisi);
- i. Pembangunan Pelabuhan Sungai Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur (termasuk supervisi);
- j. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di Provinsi Jambi 75 Unit (termasuk supervisi).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

3.1. PENGUKURAN KINERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Indikator pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Indikator pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi yang diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V
Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	2020			
				Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Menguatnya Konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	8	8	100
		Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	2. Jumlah Paket Pembangunan Rambu Sungai	Unit	75	75	100
			3. Jumlah Paket Pembangunan Halte sungai	Paket	8	8	100

	transportasi darat		4. Jumlah pembangunan pelabuhan sungai	Paket	1	1	100
			5. Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1	1	100
			6. Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	Laporan	1	1	100
2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi darat	7. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat				
			a. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	538	538	100
			b. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell	Unit	125	125	100
			c. Jumlah Warning Light Tiang Lurus Solar Cell	Unit	2	2	100
			d. Jumlah Guardrail Type II, Terminal End Lengkung	Meter	100	100	100
			e. Jumlah Delineator	Unit	300	300	100
			f. Jumlah Cermin Tikungan	Unit	-	-	
			g. Jumlah Marka Jalan	M ¹	86000	86000	100
			h. Jumlah Paku Jalan	Unit	1700	1700	100
		Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	8. Jumlah paket Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	Paket	1	1	100
			9. Jumlah Paket Pembangunan Zoss	Paket	1	1	100
			10. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan	Laporan	1	1	100

			Prasarana Perhubungan Darat				
			11. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan darat	Laporan	1	1	100
			12. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji	Laporan	1	1	100
			13. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan	Laporan	1	1	100
		Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat	14. Jumlah Paket ATCS (Lanjutan)	Paket	1	1	100
		Terwujudnya Prasarana Transportasi yang berkeselamatan	15. Jumlah lokasi Rehabilitasi UPPKB	Paket	-		
			16. Jumlah lokasi Rehabilitasi Terminal Tipe A	Paket	-		
3.	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	17. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab/Kota	7	7	100
			18. Prosentase Sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	100	100	100
			19. Prosentase pemenuhan standard operasional pelabuhan penyeberangan perintis	%	100	100	100
			20. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas perintis yang memenuhi SPM	%	100	100	100

4.	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Tersusunnya Kebijakan Keselamatan Transportasi Darat	21. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan	Bulan	12	100	100
5.	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	22. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	orang	100		
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	23. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	90	90	100
			24. Tingkat penyerapan anggaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	%	90	98,49	100
			25. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	bulan	12	12	100
			26. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	bulan	12	12	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran diperoleh persentase tingkat capaian sasaran untuk Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi sebesar 99,9%.

3.2. ANALISIS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Analisis Kinerja

Analisis pencapaian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran I (pertama) adalah menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan berikut:

- a. Meningkatnya aksesibilitas transportasi jalan;
- b. Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi.

Adapun pencapaian sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja kegiatan meningkatnya aksesibilitas transportasi jalan terdiri atas kegiatan penyelenggaraan keperintisan angkutan jalan. Pada tahun 2020 ini melayani 7 ruas trayek dengan ruas trayek dengan nilai kontrak sebesar Rp. Dengan ruas trayek sebagai berikut:

- 1) Trayek Sarolangun – Sepintun
- 2) Trayek Sarolangun – Petiduran Baru
- 3) Terminal Muara Bulian – Jangga Baru
- 4) Terminal Bangko – Desa Kibul
- 5) Terminal Bungo – Desa Bangun Seranten
- 6) Kuala Tungkal – Teluk Nilau – Senyerang
- 7) Terminal Bangko – Sungai Pinang
- 8) Terminal Tipe C Rimbo Bujang – Serai Serumpun

Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%

- b. Indikator Kinerja kegiatan terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi kegiatan terdiri atas 5 (lima) kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di Sungai Batanghari sebanyak 75 unit
Persentase capaiannya adalah sebesar 100%
- 2) Pembangunan Halte Sungai sebanyak 8 (delapan) paket yaitu:
 - a) Pembangunan Halte Sungai di Desa Sungai Beras Parit Jawa Timur Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.220.500.000
 - b) Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Beras Dusun Beringin Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.221.100.000
 - c) Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Rambut Kec. Berbak Kab. Tanjab Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.304.600.000
 - d) Pembangunan Halte Sungai Desa Kuala Lagan Kab. Tanjab Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.302.000.000
 - e) Pembangunan Halte Sungai Desa Parit Sidang Kec. Pangabuan Kab. Tanjab Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.841.600.000

- f) Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Raya Kec. Pangabuan Kab. Tanjab Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.122.100.000
 - g) Pembangunan Halte Sungai Kelurahan Betara Kiri Kec. Kuala Tungkal Kab. Tanjab Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.310.500.000
 - h) Pembangunan Halte Sungai Desa Manis Mato Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.047.500.000
- Persentase capaiannya adalah sebesar 100%

- 3) Pembangunan pelabuhan sungai di Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.650.277.000
- Persentase capaiannya adalah sebesar 100%
- 4) Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas Angkiutan Jalan di Provinsi Jambi dengan Presentase capaiannya adalah sebesar 100%
 - 5) Monitoring dan pengawasan transportasi sungai, danau dan penyeberangan perintis di Provinsi Jambi dengan presentase capaian sebesar 100%.

2. Sasaran II (kedua) adalah meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat.

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi
- b. Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi
- c. Terwujudnya kinerja pelayanan lalu lintas transportasi darat
- d. Terwujudnya prasarana transportasi yang berkeselamatan

Adapun pencapaian sasaran ini pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Kegiatan terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi terdiri atas kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di ruas jalan nasional Provinsi Jambi yaitu berupa:
 - 1) Rambu lalu lintas sebanyak 538 unit
 - 2) Lampu penerangan jalan umum 125 unit
 - 3) Warning light sebanyak 2 unit
 - 4) Guardrail sebanyak 100 m
 - 5) Deliniator sebanyak 300 unit
 - 6) Marka jalan sepanjang 86.000 meter
 - 7) Paku jalan sejumlah 1700 unit.

Adapun pencapaian sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas capaian persentase sebesar 100%

- 2) Pengadaan dan pemasangan Lampu penerangan jalan capaian persentase sebesar 100%
 - 3) Pengadaan dan pemasangan Warning light capaian persentase sebesar 100%
 - 4) Pengadaan dan pemasangan Guardrail capaian persentase sebesar 100%
 - 5) Pengadaan dan pemasangan Deliniator capaian persentase sebesar 100%
 - 6) Pengadaan dan pemasangan Marka jalan capaian persentase sebesar 100%
 - 7) Pengadaan dan pemasangan Paku jalan capaian persentase sebesar 100%.
- b. Indikator Kinerja Kegiatan terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi terdiri atas:
- 1) kegiatan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan nasional Provinsi Jambi sebanyak 1 (satu) paket. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
 - 2) Kegiatan pembangunan ZOSS di Provinsi Jambi sebanyak 1 (satu) paket. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
 - 3) Monitoring dan pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat di Provinsi Jambi. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
 - 4) Monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan darat di Provinsi Jambi. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
 - 5) Pelaksanaan kalibrasi alat uji. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
 - 6) Pemeriksaan fisik ruang bangun sarana angkutan jalan. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
- c. Indikator Kinerja Kegiatan terwujudnya kinerja pelayanan lalu lintas transportasi darat terdiri atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Kota Jambi, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.447.800.000, adapun titik-titik pemasangan ATCS tersebut adalah:
- 1) Simpang Rimbo. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
 - 2) Simpang Adipura. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
 - 3) Simpang Museum Juang. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
 - 4) Simpang Tanjung Lumut. Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.
3. Sasaran III (ketiga) adalah meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan.
- Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator Kinerja Kegiatan yaitu: Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Adapun pencapaian sasaran ini pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Indikator kinerja kegiatan terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi terdiri atas kegiatan:

- a. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji.

Pada tahun 2020 ini terdapat 7 Dishub Kab/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji

Adapun presentase capaiannya adalah sebesar 100%.

- b. Presentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM mencapai 100%.

- c. Presentase kapal penyeberangan pada lintas perintis yang memiliki SPM sebesar 100%.

4. Sasaran IV (keempat) adalah manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat.

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator Kinerja Kegiatan yaitu: Tersusunnya kebijakan keselamatan transportasi darat.

Adapun pencapaian sasaran ini pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Indikator kinerja kegiatan tersusunnya kebijakan keselamatan transportasi darat atas jumlah dukungan bidang pembinaan dan keselamatan yang telah dilakukan selama 12 (dua belas) bulan. Persentase capaiannya adalah sebesar 100%.

5. Sasaran V (kelima) adalah meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat.

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator Kinerja Kegiatan yaitu: Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi.

Adapun pencapaian sasaran ini pada tahun 2020 sebagai berikut:

Indikator kinerja kegiatan terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi melalui jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat.

Pada tahun 2020 ini terdapat 50 Pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yang mudah memiliki sertifikat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis. Persentase capaiannya adalah sebesar 50%.

6. Sasaran VI (keenam) adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator Kinerja Kegiatan yaitu: Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi.

Adapun pencapaian sasaran ini pada tahun 2020 sebagai berikut:

Indikator kinerja kegiatan terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi terdiri atas:

- a. Nilai Akip Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Sebesar 90%
- b. Tingkat penyerapan anggaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi sebesar 92,21 %
- c. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran telah dilaksanakan selama 12 bulan, persentase capaian sebesar 100%.
- d. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan telah dilaksanakan selama 12 bulan, persentase capaian sebesar 100%.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran yang rendah dari alokasi atau prosentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dapat tercapai sesuai target. Analisis Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020.

Alokasi Anggaran Tahun 2020

PAGU ANGGARAN

Pada bulan Oktober Tahun 2020 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi mendapatkan tambahan alokasi dana dari pusat sehingga total pagu nya menjadi Rp. 99.049.535.000,- dari semula sebesar Rp. 89.049.535.000.

Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	:	Rp. 13.295.500.000,-
Belanja Barang	:	Rp. 54.263.436.000,-
Belanja Modal	:	Rp. 31.591.450.000,-

Rincian realisasi anggaran Balai Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi per Jenis Belanja TA. 2020 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	13.295.500.000,-	13.256.260.630,-	99,70%
2	Belanja Barang	54.263.436.000,-	53.488.543.464,-	98,57%
3	Belanja Modal	31.591.450.000,-	30.911.628.390,-	97,85%
	Jumlah	99.150.386.000,-	97.656.432.484,-	98,49%

3.3. HAMBATAN DAN KENDALA

Dalam Penyusunan LAKIP Tahun 2020 unit kerja Eselon III Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi terdapat beberapa hambatan dan kendala yang terjadi, yaitu: Data yang disampaikan masih ada yang bersifat sementara. Sesuai dengan PM Perhubungan No. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, batas waktu penyampaian dokumen LAKIP adalah 25 Januari 2021, sedangkan salah satu materi dari dokumen LAKIP adalah realisasi keuangan. Untuk mendapatkan hasil realisasi keuangan yang akurat harus melalui rekonsiliasi keuangan, dalam laporan ini hasil realisasi keuangan masih berupa data sementara.

3.4. USULAN PERBAIKAN

Sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengevaluasi hambatan dan kendala yang terjadi selama penyusunan LAKIP Tahun 2020 unit kerja Eselon III Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi, maka diusulkan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Koordinasi intensif di dalam internal institusi terkait dengan adanya perubahan-perubahan dalam hal format dan sistematika pengerjaan LAKIP;
2. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif terkait dengan waktu untuk penyusunan LAKIP agar tidak terlalu mendesak sehingga bisa didapatkan hasil lebih maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi telah melaksanakan 26 keseluruhan Indikator Kinerja Utama, dimana 26 Indikator Kinerja Kegiatan memiliki persentase pencapaian tingkat capaian sama dengan 100%.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Eselon III Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi;
3. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2020-2024, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2020 ini secara umum telah dapat dilaksanakan;
4. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran adalah adanya kebijakan dan program yang jelas, tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai, Sistem Kerja sama dan koordinasi yang baik, serta didukung oleh peralatan kerja yang cukup;
5. Untuk meningkatkan dan memudahkan dalam menyusun LAKIP ini dimasa yang akan datang, maka selain dalam perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya harus mengikuti Rencana Strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020-2020.



LAMPIRAN



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

JAMBI, JANUARI 2020

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

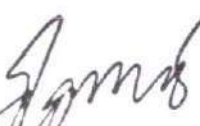
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	8
		2. Jumlah Paket Pembangunan Rambu Sungai	Paket	3
		3. Jumlah Paket Pembangunan Halte Sungai	Paket	8
		4. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai	Paket	1
		5. Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
		6. Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	Laporan	1
2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	7. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
		a. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	538
		b. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell	Unit	125
		c. Jumlah Warning Light Tiang Lurus Solar Cell	Unit	2
		d. Jumlah Guardrail Type II, Terminal End Lengkung	Meter	100
		e. Jumlah Delineator	Unit	300
		f. Jumlah Cermin Tikungan	Unit	-
		g. Jumlah Marka Jalan	M ²	86000
		h. Jumlah Paku Jalan	Unit	1700
		8. Jumlah paket Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	Paket	1
		9. Jumlah paket pembangunan Zoss	Paket	1
		10. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Laporan	1
		11. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Laporan	1
		12. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji	Laporan	1

		13. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun sarana Angkutan Jalan	Laporan	1
		14. Jumlah Paket ATCS (Lanjutan)	Paket	1
		15. Jumlah lokasi Rehabilitasi UPPKB	Paket	-
		16. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal Tipe A	Paket	-
3.	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	17. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab/Kota	7
		18. Prosentase Sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	100
		19. Prosentase pemenuhan standard operasional pelabuhan penyeberangan lintas perintis	%	100
		20. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas perintis yang memenuhi SPM	%	100
4.	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	21. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan	Bulan	12
5.	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	22. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	orang	100
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	23. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	90
		24. Tingkat penyerapan anggaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	%	90
		25. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	bulan	12
		26. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	bulan	12

Jambi, Januari 2020

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI


ARDONI, A.T.D., MT

Pembina Tk. I - (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARDONO, ATD, MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2020

Pihak Pertama,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784

ARDONO, ATD, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya Konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	8
		Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	2. Jumlah Paket Pembangunan Rambu Sungai	Paket	3
			3. Jumlah Paket Pembangunan Halte sungai	Paket	8
			4. Jumlah pembangunan pelabuhan sungai	Paket	1
			5. Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
			6. Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	Laporan	1
2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	7. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
			a. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	538
			b. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell	Unit	125
			c. Jumlah Warning Light Tiang Lurus Solar Cell	Unit	2
			d. Jumlah Guardrail Type II, Terminal End Lengkung	Meter	100
			e. Jumlah Delineator	Unit	300
			f. Jumlah Cermin Tikungan	Unit	-
			g. Jumlah Marka Jalan	M ¹	86000
			h. Jumlah Paku Jalan	Unit	1700
		Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	8. Jumlah paket Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	Paket	1

			9. Jumlah Paket Pembangunan Zoss	Paket	1
			10. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Laporan	1
			11. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan darat	Laporan	1
			12. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji	Laporan	1
			13. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan	Laporan	1
		Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat	14. JumlahPaket ATCS (Lanjutan)	Paket	1
3.	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi criteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya Prasarana Transportasi yang berkeselamatan	15. Jumlah lokasi Rehabilitasi UPPKB	Paket	-
			16. Jumlah lokasi Rehabilitasi Terminal Tipe A	Paket	-
		Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	17. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab/Kota	7
			18. Prosentase Sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	100
			19. Prosentase pemenuhan standard operasional pelabuhan penyeberangan perintis	%	100
4.	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Tersusunnya Kebijakan Keselamatan Transportasi Darat	20. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas perintis yang memenuhi SPM	%	100
			21. Jumlah Dukungan - Bidang Pembinaan dan Keselamatan	Bulan	12

5.	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	22. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	orang	100
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	23. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	90
			24. Tingkat penyerapan anggaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	%	90
			25. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	bulan	12
			26. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	bulan	12

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas jalan	Rp. 12.691.000.000,-
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 6.222.358.000,-
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 11.603.632.000,-
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 2.500.000.000,-
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp. 28.408.137.000,-
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 27.524.408.000,-

Pihak Kedua,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama,


ARDONO, ATD, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19671112 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FADJAR RIJADI, ST, MT**

Jabatan : **KASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARDONO, ATD, MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

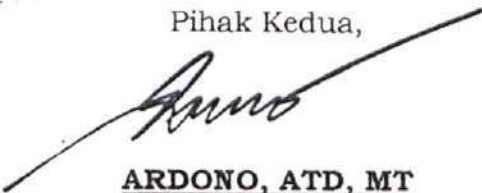
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ARDONO, ATD, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002

Jambi, Januari 2020

Pihak Pertama,


FADJAR RIJADI, ST, MT

Penata Tk. I – (III/d)

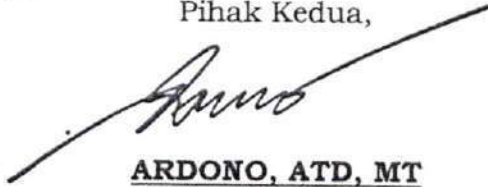
NIP. 19711119 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya Konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	8
		Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	2. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Laporan	1
			3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan dan Penyeberangan.	Laporan	1
			4. Monitoring dan Pembahasan Andalalin	Laporan	1
			5. Heregritasi AKAP, Pariwisata dan AJAP	Laporan	1
			6. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Laporan	1
			7. Audit dan Inspeksi Jalan Nasional	Laporan	1
			8. Inventarisasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Laporan	1
2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya keselamatan dan keamanan prasarana transportasi darat	1. Jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	paket	1
			2. Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	paket	6
			3. Jumlah paket pembangunan Zoss	paket	1
			4. Kontingensi Perlengkapan Jalan	paket	1
		Terwujudnya kinerja pelayanan lalu lintas transportasi darat	5. Jumlah paket ATCS (lanjutan)	paket	1

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 12.691.000.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 6.222.358.000
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 2.500.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubdat	Rp. 1.120.000.000

Pihak Kedua,



ARDONO, ATD, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002

Jambi, Januari 2020

Pihak Pertama,



FADJAR RIJADI, ST, MT

Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19711119 199903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YULIANSYAH, S.SiT, MM**

Jabatan : **KASI TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PERINTIS**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARDONO, ATD, MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARDONO, ATD, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002

Jambi, Januari 2020

Pihak Pertama,

YULIANSYAH, S.SiT, MM

Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19800713 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya Konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	1. Jumlah Paket Pembangunan Halte sungai 2. Jumlah Paket Rambu Sungai 3. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai 4. Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	Paket Paket Paket Laporan	8 3 1 1
2	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	5. Prosentase pemenuhan standard operasional pelabuhan penyeberangan perintis 6. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas perintis yang memenuhi SPM	% %	100 100

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp. 28.408.137.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubdat	Rp. 100.000.000

Pihak Kedua,

ARDONO, ATD, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002

Jambi, Januari 2020

Pihak Pertama,

YULIANSYAH, S.SiT, MM

Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19800713 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HARWINANTO, SE, MT**

Jabatan : **KASUBAG TATA USAHA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARDONO, ATD, MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARDONO, ATD, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002

Jambi, Januari 2020

Pihak Pertama,

HARWINANTO, SE, MT

Pembina – (IV/a)

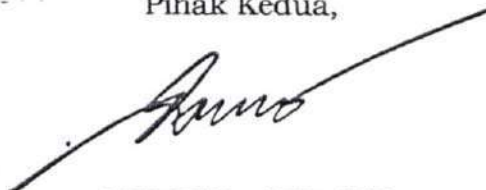
NIP. 19730313 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	1. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	orang	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	2. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	90
			3. Tingkat penyerapan anggaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	%	90
			4. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	bulan	12
			5. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	bulan	12

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 25.954.408.000

Pihak Kedua,



ARDONO, ATD, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002

Jambi, Januari 2020

Pihak Pertama,



HARWINANTO, SE, MT

Pembina – (IV/a)

NIP. 19730313 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YULIANA Y.S. PANJAITAN, S.SiT**

Jabatan : **KASI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARDONO, ATD, MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jambi, Januari 2020

Pihak Pertama,

ARDONO, ATD, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002

YULIANA Y.S. PANJAITAN, S.SiT

Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19790701 200112 2 005

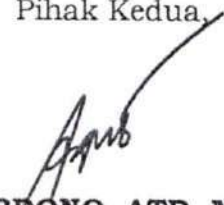
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	1. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	Laporan	1
			2. Monitoring, Evaluasi dan Akreditasi UPUBKB	Laporan	1
			3. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	Laporan	1
			4. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB	Laporan	1
		Terwujudnya prasarana transportasi yang berkeselamatan	5. Jumlah lokasi rehabilitasi UPPKB	Paket	-
			6. Jumlah lokasi rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A	Paket	-
2.	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan sarana transportasi darat	7. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji UPUBKB	Kab/Kota	7
3.	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Terwujudnya Keselamatan Transportasi Darat	8. Pengadaan Peralatan dan Mesin di Terminal Penumpang Tipe A	Paket	4
			9. Pengadaan Peralatan dan Mesin di UPPKB	Paket	3
			10. Jumlah dukungan pembinaan dan pengembangan keselamatan	Bulan	12

		Terwujudnya layanan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	11. Operasional Terminal Penumpang Tipe A dan UPPKB	Bulan	12
--	--	--	---	-------	----

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 11.603.632.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 350.000.000,-

Pihak Kedua,

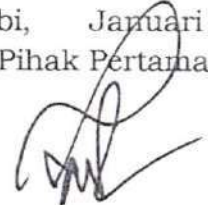

ARDONO, ATD, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19671112 199103 1 002

Jambi, Januari 2020

Pihak Pertama,


YULIANA Y.S. PANJAITAN, S.SiT

Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19790701 200112 2 005

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana/ Penanggungjawab
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Menguatnya Konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	8	1. Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Jambi	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					2. Pengawasan Subsidi Operasi Bus Perintis					
		2. Jumlah Paket Pembangunan Rambu Sungai	Paket	3	1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai - Di Sungai Batanghari - Di Sungai Mendahara - Di Sungai Sadu	√	√	√	√	Seksi Transportasi SDP Perintis
		3. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai	Paket	1	1. Pembangunan Pelabuhan Sungai Kuala Jambi Kabupaten Tanjab Timur	√				Seksi Transportasi SDP Perintis
		4. Jumlah Paket Pembangunan Halte Sungai	Paket	8	1. Pembangunan Halte Sungai - Desa Sungai	√	√	√	√	Seksi Transportasi SDP Perintis

						Rambut Kecamatan Berkak ; - Desa Sungai Beras Parit Jawa Timur Kecamatan Mendahara Hulu; - Desa Sungai Beras Dusun Beringin Kec. Mendahara Hulu; - Desa Kuala Simbur RT10 Kec. Muara Sabak Timur; - Dusun Kelagian Lama Desa Kelagian Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat; - Dusun Teluk Pangkah Desa Teluk Pangkah Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat; - Kelurahan Betara Kiri Kec. Kuala Tungkal; - Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan Kab. Tanjab Barat;					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		5. Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1	1.	Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		6. Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	Laporan	1	1.	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	√	√	√	√	Seksi Transportasi SDP Perintis
2	Meningkatnya keselamatan sector transportasi darat	7. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat									
		a. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	538	1.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan - Jalan Nasional Perkotaan Provinsi Jambi - Jalan Nasional Perkotaan Kota Sungai Penuh - Nomor Ruas 023 Muara Tembesi – Bts. Kota Muara Bulian - Nomor Ruas 034 Bangko – Sei Manau - Nomor Ruas 037		√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		b. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell	Unit	125							
		c. Jumlah Warning Light Tiang Lurus Solar Cell	Unit	2							
		d. Jumlah Guardrail Type II, Terminal End Lengkung	Meter	100							

		e. Jumlah Delineator	Unit	300		Sanggaran Agung - Sei Penuh - Nomor Ruas 027 Bts. Kota Jambi - Talang Duku					
		f. Jumlah Cermin Tikungan	Unit	-							
		g. Jumlah Marka Jalan	M ¹	86000							
		h. Paku Jalan	Unit	1700							
		8. Jumlah Paket Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpelihara	Paket	1	1.	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Jambi	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		9. Jumlah Paket Pembangunan Zoss	Paket	1	1.	Pembangunan Zoss Jalan Nasional Provinsi Jambi	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		10. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Laporan	1	1.	Monitoring dan Pengawasan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					2.	Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
		11. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan	Laporan	1	1.	Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi

		Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat				Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat					Jalan
		12. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji	Laporan	1	1.	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		13. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan	Laporan	1	1.	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		14. Jumlah Paket ATCS	Paket	1	1.	Pembangunan dan Pengadaan ATCS	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		15. Jumlah lokasi Rehabilitasi UPPKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16. Jumlah lokasi Rehabilitasi Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Jumlah Sarana Transportasi Darat Yang Memenuhi Kriteria Kinerja (SPM) Yang Ditetapkan	17. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab/Kota	7	1.	Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		18. Prosentase Sarana Pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	100	1.	Monitoring dan Pengawasan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					2.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil	√	√	√	√	

						dan Perintis Jalan dan Penyeberangan						
					3.	Heregistrasi AKAP, Pariwisata dan AJAP	√	√	√	√		
					4.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	√	√	√	√		
		19. Prosentase pemenuhan standard operasional pelabuhan penyeberangan lintas perintis	%	100	1.	Monitoring dan Pengawasan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	√	√	√	√	Seksi Transportasi SDP Perintis	
					2.	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	√	√	√	√		
					3.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan dan Penyeberangan	√	√	√	√		
		20. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas perintis yang memenuhi SPM	%	100	1.	Monitoring dan Pengawasan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	√	√	√	√	Seksi Transportasi SDP Perintis	
					2.	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	√	√	√	√		
					3.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan dan Penyeberangan	√	√	√	√		

4.	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	21. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan	Bulan	12	1.	Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Transportasi Darat	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5.	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	22. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	orang	100	1.	Bimbingan Teknis, Mengikuti Diklat	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	23. Nilai AKIP B	%	90	1.	Penyusunan SAKIP, LAKIP, LAPTAH dan Penetapan Kinerja	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
		24. Tingkat penyerapan anggaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	%	90	1.	Penyusunan SAKIP, LAKIP, LAPTAH dan Penetapan Kinerja	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
		25. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	bulan	12	1.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					2.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					3.	Pengelolaan Kepegawaian	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					4.	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha

					5.	Layanan Internal (Overhead)	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					6.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
		26. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	bulan	12	1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	√	√	√	√	Kasubbag Tata Usaha